



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

STUDI BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SUMATERA BARAT

Oleh

VANI CHRISTALIA PUTRI

06 951 016

Mahasiswa Program S-1
Jurusan Ilmu Ekonomi

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

2011

No.Alumni Universitas	VANI CHRISTALIA PUTRI	No.Alumni Fakultas
BIODATA		
a). Tempat/Tgl lahir: Padang, 20 September 1988 b). Nama Orang Tua: Isral c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 06 951 016 f). Tgl Lulus: 2 Februari 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,27 i). Lama Studi: 4 tahun 6 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Gajah Mada SK 15/18, Gunung Pangilun, Padang		
Studi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Barat		
<i>Skripsi SI Oleh: Vani Christalia Putri</i>		<i>Pembimbing: Drs. Zulkarnaini Ras, M.Si</i>
ABSTRAK		
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat. Belanja modal merupakan belanjapemda yang manfaatnya melebihi satu anggaran, seperti belanja yang digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan sarana dan prasarana public. Dengan pemanfaatan belanja modal yang tepat dan efektif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2000-2008. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, uji model, serta uji Determinasi, dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berhubungan negative terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara serempak mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 91,7%. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah khususnya pemda di Sumatera Barat dalam meningkatkan kinerja pemdanaan bagi investor, yang nantinya bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi, serta bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mengenai belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah</p>		

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Seminar Hasil Skripsi dan dinyatakan lulus pada 2 Februari 2011. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Zulkarnaini, M.Si	Dra. Laksmi Dewi, M.Si	Dra. Syukriati Syukur, MSi

Mengetahui :
 Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi : Prof.Dr.H.Firwan Tan.SE.M.Ec.DEA.Ing
 NIP. 130812952 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan (manajemen) pemerintah daerah mengalami perubahan yang sangat berarti sejalan dengan diimplementasikannya otonomi daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan arti penting bagi system pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintah daerah, baik dalam penggalan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki.

Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kamandirian untuk mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri akan terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan (partisipasi) publik (Adi,2007). Hal ini relatif akan dapat terwujud bila terjadi proses distribusi, baik pada kebutuhan masyarakat maupun perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat secara merata.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius (pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Dalam upaya pencapaian kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif di daerah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintahan daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditunjukkan untuk meningkatkan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Otonomi daerah menuntut kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dilakukan desentralisasi fiskal yang memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk lebih leluasa mengelola sumber ekonomi dan potensi daerah yang ada di daerah masing-masing. Berdasarkan hasil studi empiris, belanja modal berhubungan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Barat. Belanja modal dan pendapatan asli daerah berhubungan negatif karena jika belanja modal naik sebesar 1%, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah sebesar 0,53%. Hasil studi empiris dalam penelitian ini, berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya positif, akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah. Dari hasil studi empiris, diperoleh hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1%, maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 4,82%.

Jika belanja modal yang dikeluarkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan menghasilkan hubungan yang positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil studi empiris membuktikan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara serempak mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 91,7%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2005, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Adi, Priyo Hari, 2007, *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten dan Kota Se Jawa – Bali*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah (Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah)*; Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. www.Bappenas.go.id.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004, *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- BPS, 2003. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2000-2003*. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS, 2005. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2002-2005*. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS, 2003. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2008*. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS, 2000. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2000*. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang.
-, 2001. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2001*. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang.
-, 2002. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2002*. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. Padang.